

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2015-2019

Riki Setiawan¹
Yuliusman²
Susfa Yetti³

¹Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

^{2&3}Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

Email: rikisetiawan1806@yahoo.co.id¹, yuliusman@unja.ac.id², susfa_yetti@unja.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to analyze the regional financial performance of districts/cities in Jambi Province for 2015-2019. The variables used are in terms of the ratio of PAD performance mapping, regional financial capacity index (IKK), level of regional independence, level of regional dependence and mapping of regional financial capacity. The method of collecting data in this research is using document notes and financial reports of regencies/cities in Jambi Province. The results of the analysis show that the mapping of PAD performance which is categorized as ideal is Bungo Regency and Batanghari Regency. The average IKK in the districts/cities in Jambi Province is categorized as high proficiency. The level of regional independence for all districts/cities in Jambi Province is categorized as a low level of independence. The level of regional dependence is still high in all districts/cities in Jambi Province. Mapping of regional financial capacity shows that the regions with a high level of independence with a low level of dependence are Bungo District and Jambi City.

Keywords: PAD Performance, Growth, Share, IKK, Independence, Dependency

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi untuk tahun 2015-2019. Variabel yang digunakan yaitu ditinjau dari rasio Pemetaan kinerja PAD, Indeks kemampuan keuangan daerah (IKK), Tingkat kemandirian daerah, Tingkat ketergantungan daerah dan Pemetaan kemampuan keuangan daerah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumen catatan dan laporan keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemetaan kinerja PAD yang dikategorikan ideal adalah Kabupaten Bungo dan Kabupaten Batanghari. Rata-rata IKK di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dikategorikan sebagai kemampuan tinggi. Tingkat kemandirian daerah untuk semua Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dikategorikan sebagai tingkat kemandirian rendah. Tingkat ketergantungan daerah masih tinggi untuk semua Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Pemetaan kemampuan keuangan daerah menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kemandirian tinggi dengan tingkat ketergantungan rendah adalah Kabupaten Bungo dan Kota Jambi.

Kata Kunci: Kinerja PAD, *Growth, Share*, IKK, Kemandirian, Ketergantungan

1. PENDAHULUAN

Sampai saat ini, penelitian mengenai otonomi daerah yang berdampak pada kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah masih merupakan topik yang selalu menarik untuk diteliti dan didiskusikan. Studi mengenai otonomi daerah tidak hanya menjadi ranah ekonomi, tetapi juga memiliki hubungan ataupun keterkaitan yang erat dengan bidang lainnya seperti politik, administrasi dan geografis. Disamping itu hasil kajian mengenai otonomi daerah dari sudut pandang pengelolaan keuangan daerah terkadang menghasilkan kesimpulan yang berbeda diantara para peneliti.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anim Rahmayati (2016) yang meneliti tentang analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2011-2013 tersebut menyimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian daerah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Marina F. Pandjaitan, Parengkuan Tommy, Victoria N. Untu (2018) menyimpulkan bahwa rata-rata derajat desentralisasi masih sangat rendah, rasio ketergantungan keuangan daerah masih tinggi, rasio kemandirian keuangan daerah rendah dengan pola konsultatif, rasio belanja operasi terhadap total belanja mendominasi alokasi belanja dibandingkan rasio belanja modal terhadap total belanja dan rasio efisiensi belanja kurang efisien.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi telah mengalami perlambatan terutama menjelang akhir tahun 2015. Ini menunjukkan bahwa secara makro, kontribusi ekonomi di Provinsi Jambi terhadap rakyat telah terjadi sedikit penurunan. Di sisi lain, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga memiliki implikasi di mana ia mendorong sektor-sektor ekonomi daerah ke arah peningkatan pendapatan daerah. Dimana bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 4,21% kemudian meningkat menjadi 4,60% pada tahun 2017. Sedangkan di tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yaitu berada di 4,40%. BPS melansir capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5%.

Pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jambi dalam rangka desentralisasi saat ini belum optimal. Ini bisa dilihat dari rasio PAD terhadap APBD. Rasio Provinsi Jambi ini selama lima tahun terakhir belum mengalami kenaikan yang signifikan, bahkan ada kecenderungan menurun. Menurut Ariansyah (2012) bila PAD meningkat maka tingkat ketergantungan fiskal suatu daerah akan semakin berkurang. Nilai rasio yang lebih besar berarti bahwa keuangan daerah lebih mandiri. Sebaliknya, nilai rasio PAD yang lebih rendah pada APBD menunjukkan bahwa keuangan lokal kurang independen.

Analisis rasio keuangan dalam penelitian ini digunakan untuk tolok ukur dalam: melihat kinerja keuangan jika dilihat dari pemetaan kinerja PAD, melihat kinerja keuangan jika dilihat dari indeks kemampuan keuangan, melihat kinerja keuangan jika dilihat dari tingkat kemandirian daerah, melihat kinerja keuangan jika dilihat dari tingkat saling ketergantungan regional, dan melihat kinerja keuangan jika dilihat dari pemetaan kemampuan keuangan daerah. Dengan digunakannya analisis keuangan tersebut maka akan memberikan suatu hasil perbandingan kinerja keuangan dari tahun-tahun sebelumnya, di mana nantinya akan menggambarkan kondisi Kinerja Keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun anggaran 2015-2019.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2015-2019, (2) Rata-rata kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2015-2019.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Pemetaan Kinerja PAD

Pemetaan kinerja PAD digunakan untuk menentukan posisi kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang diukur dengan pertumbuhan (*growth*) PAD, dan kontribusi (*share*) terhadap APBD. Formulasi dijelaskan

sebagai berikut:

$$\text{Growth} : \frac{\Delta \text{PAD}}{\text{PAD}_{t-1}} \times 100\%$$

$$\text{Share} : \frac{\text{PAD}_t}{\text{TB}} \times 100\%$$

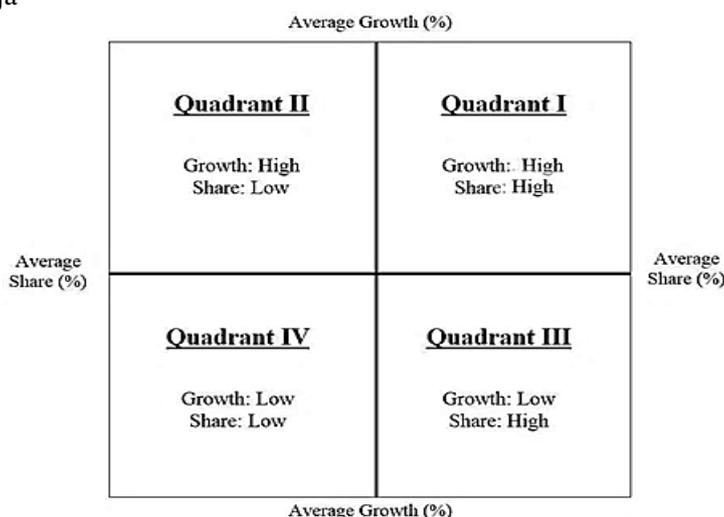
Keterangan:

ΔPAD : Perubahan Pendapatan asli daerah

PAD_{t-1} : Pendapatan asli daerah di tahun t-1

PAD_t : Pendapatan asli daerah di tahun t

TB : Total Belanja



Gambar 1: Peta Kemampuan Keuangan Berdasarkan Kuadran

Klasifikasi kinerja PAD dan deskripsi sebagai berikut:

Tabel 1: Klasifikasi Status Kinerja PAD berdasarkan Metode Kuadran

Quadrant	Condition
I	Kondisi ideal, PAD memiliki peran besar dalam Anggaran Pembangunan Daerah (APBD) dan daerah memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan oleh nilai pertumbuhan yang tinggi disertai dengan nilai kontribusi yang tinggi.
II	Kondisi belum ideal, tetapi daerah tersebut memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi lokal. Dengan demikian, ada peluang besar bagi PAD untuk memiliki peran besar dalam APBD. Tingkat pertumbuhan PAD yang tinggi, tetapi kontribusi PAD yang rendah terhadap Total Belanja.
III	Kondisi belum ideal, Peran besar PAD dalam APBD mungkin menurun karena tingkat pertumbuhan PAD yang rendah. Kontribusi PAD yang tinggi terhadap Total Belanja tetapi pertumbuhan PAD rendah.
IV	Kondisi buruk, PAD tidak memainkan peran utama dalam APBD dan daerah belum dapat mengembangkan potensi lokal. Pertumbuhan PAD dan kontribusi PAD terhadap Total Belanja sama-sama rendah.

Sumber: Basri, 2013

2.2. Indeks Kemampuan Keuangan

Indeks kemampuan keuangan (IKK) adalah nilai rata-rata indeks pertumbuhan, indeks saham, dan indeks elastisitas. Untuk membangun indeks dari ketiga komponen ini, nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen ditentukan. Formula elastisitas ditunjukkan sebagai berikut:

$$\text{Elastisitas} : \frac{\Delta \text{PAD}/\text{PAD}_{t-1}}{\Delta \text{PDRB}/\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

- ΔPAD : Ubah Pendapatan asli daerah
- PADt-1 : Pendapatan asli daerah di tahun t-1
- ΔPDRB : Perubahan Produk Domestik Regional Bruto
- PDRBt-1 : Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t-1

Selanjutnya Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Index X} = \frac{\text{Measure result X Value} - \text{Minimum X Value}}{\text{Maximum X Value} - \text{Minimum X Value}}$$

IKK dicapai dengan rata-rata indeks *growth*, indeks *share*, dan indeks elastisitas. Perhitungan IKK ditampilkan sebagai berikut (Dethan, 2015):

$$\text{IKK} : \frac{Xg+Xs+Xe}{3}$$

Keterangan:

- XG = Indeks *growth*
- XS = Indeks *share*
- XE = Indeks elastisitas

Kriteria kemampuan keuangan daerah ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2: Level Kriteria Indeks kemampuan keuangan

Indeks kemampuan keuangan	Klasifikasi kemampuan keuangan
0,00-0,33	Low
0,34-0,43	Moderate
0,44-1,00	High

Sumber: Hidayat et al., 2016

2.3. Tingkat Kemandirian Daerah

Tingkat kemandirian daerah dirumuskan sebagai berikut (Pratidina, 2013):

$$\text{TKD} : \frac{\text{PAD}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

Keterangan:

- TKD = Tingkat Kemandirian Daerah
- PAD = Pendapatan yang Dihasilkan Secara Lokal
- TPD = Total Pendapatan Daerah

Tingkat kemandirian daerah dan pola hubungan ini diklasifikasi sebagai berikut:

Tabel 3: Tingkat Kemampuan dan Pola Hubungan Pemerintah Pusat

Tingkat Kemandirian (%)	Kemampuan Finansial	Pola Hubungan	Tingkat Kemandirian
<25	Sangat rendah	Tidak mampu	Instruktif
26-50	Rendah	Kurang Mandiri	Konsultatif
51-75	Sedang	Cukup Mandiri	Partisipatif
76-100	Tinggi	Mandiri	Delegatif

Sumber: Basri, 2013

2.4. Tingkat Ketergantungan Daerah

Tingkat saling ketergantungan daerah menggambarkan bagaimana saling ketergantungan suatu daerah terhadap pendanaan eksternal atau mentransfer dana dari pemerintah pusat atau provinsi dalam mendanai proses tata kelola. Tingkat saling ketergantungan dapat diukur sebagai berikut (Basri, 2013):

$$\text{TKtD} = \frac{\text{TD}}{\text{Tpd}} \times 100\%$$

Keterangan:

TKtD = Tingkat ketergantungan daerah

TD = Transfer Dana

Tpd = Total Pendapatan Daerah

Tabel 4: Tingkat Ketergantungan Daerah

Tingkat saling ketergantungan (%)	Conclusion
≤ 25	Ketergantungan fiskal rendah, artinya kinerja anggaran sangat baik.
26-50	Ketergantungan fiskal cukup baik, yang berarti bahwa kinerja anggaran cukup baik
51-75	Ketergantungan fiskal tinggi, yang berarti bahwa kinerja anggaran tidak baik.
76-100	Ketergantungan fiskal sangat tinggi, yang berarti bahwa kinerja anggaran sangat buruk.

Sumber: Basri, 2013

2.5. Peta Kemampuan Keuangan Daerah

Pemetaan kemampuan keuangan daerah menggunakan dua indikator, yaitu: tingkat kemandirian daerah dan tingkat saling ketergantungan daerah yang diklasifikasikan sebagai berikut (Basri, 2013):

Tabel 5: Pemetaan Kemampuan Keuangan Daerah

Uraian	TKtD i > TKtD	TKtD i < TKtD
TKDi > \bar{x} TKD	Wilayah mandiri dengan tingkat Ketergantungan tinggi.	Wilayah Mandiri dengan tingkat ketergantungan rendah.
TKDi < \bar{x} TKD	Wilayah belum mandiri dan tingkat ketergantungan tinggi/	Wilayah belum Mandiri dan tingkat Ketergantungan rendah.

Sumber: Basri, 2013

Keterangan:

TKD = Tingkat Kemandirian Daerah

TKtD = Tingkat Ketergantungan Daerah

TKDi = Tingkat Kemandirian Daerah dalam Tahun i

TKtDi = Tingkat Ketergantungan Daerah dalam tahun i

\bar{x} TKD = Rata-Rata Tingkat Kemandirian Daerah

\bar{x} TKtD = Rata-Rata Tingkat ketergantungan regional

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Growth

Growth dalam konteks ini adalah tingkat pertumbuhan tahunan PAD di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2015-2019. Rata-rata pertumbuhan (*Growth*) PAD kabupaten/kota di Provinsi Jambi dari tahun 2015 hingga 2019 adalah 12,60%. Tren laju pertumbuhan rata-rata PAD di kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir tertinggi adalah di Kabupaten Sarolangun (29,23%) dan diikuti oleh Kabupaten Batanghari (19,78%), Kabupaten Tanjung Jabung Timur (17,95%), Kabupaten Kerinci (15,35%), Kota Sungai Penuh (10,60%), Kabupaten Tanjung Jabung Barat (9,07%), Kabupaten Tebo (8,83%), Kabupaten Bungo (8,76%), Kabupaten Muaro Jambi (7,18%), Kabupaten Merangin (6,40%) dan terakhir adalah Kota Jambi (5,50%).

3.2. Share

Share merupakan rasio PAD terhadap Total Belanja. Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan

keuangan daerah dalam membiayai kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah. Kontribusi (*Share*) rata-rata PAD terhadap total belanja kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama tahun 2015-2019 adalah 7,89%. Kontribusi PAD terhadap total belanja selama tahun 2015 hingga 2019 yang tertinggi berada di daerah Kota Jambi (20,04%) diikuti oleh Kabupaten Bungo (9,97%), Kabupaten Batanghari 8,39%, Kabupaten Sarolangun 7,14%, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 6,92%, Kabupaten Tebo 6,63%, Kabupaten Kerinci 6,53%, Kabupaten Merangin 6,06%, Kabupaten Kota Sungai Penuh 5,37%, Kabupaten Muaro Jambi 5,33% dan yang terendah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 4,44%.

3.3. Elastisitas

Elastisitas adalah pengukuran sensitivitas atau elastisitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Elastisitas rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama tahun 2015-2019 adalah 3,61%. Elastisitas rata-rata per kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama tahun 2015 hingga 2019 yang tertinggi berada di daerah Kabupaten Sarolangun yaitu sebesar 6,59% kemudian diikuti oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 6,26%, Kabupaten Batanghari sebesar 4,66%, Kabupaten Kerinci sebesar 3,73%, Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 3,32%, Kabupaten Tebo sebesar 3,27%, Kota Jambi sebesar 3,15%, Kabupaten Muaro Jambi sebesar 2,54%, Kabupaten Merangin sebesar 2,45%, Kota Sungai Penuh sebesar 2,10%, Kabupaten Bungo sebesar 1,61%.

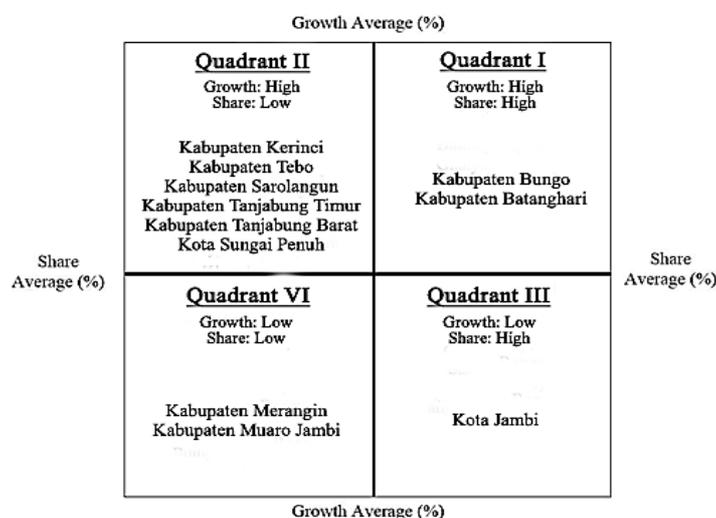
3.4. Pemetaan Kinerja PAD

Berdasarkan hasil perhitungan *growth* dan *share* dengan menggunakan titik tengah rata-rata (median) ditemukan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada kuadran I adalah Kabupaten Bungo dan Kabupaten Batanghari. Kondisi ini sangat ideal. PAD mengambil peran besar dalam APBD dan daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan besarnya nilai *share* disertai nilai *growth* yang tinggi.

Pada kuadran II adalah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Tanjung Jabung dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kabupaten/Kota di kuadran II ini memiliki nilai *growth* yang tinggi namun memiliki nilai *share* yang rendah. Kondisi ini belum ideal, tapi daerah punya kemampuan untuk mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam APBD.

Pada kuadran III adalah Kota Jambi, dan adalah satu-satunya wilayah yang berada pada kuadran ini. Kondisi ini belum ideal. Peran PAD yang besar dalam APBD punya peluang menurun karena pertumbuhan PAD yang rendah. Kontribusi PAD yang tinggi terhadap Total Belanja tetapi pertumbuhan PAD rendah.

Daerah yang termasuk dalam di kuadran IV adalah Kabupaten Merangin dan Muaro jambi. Kondisi ini paling buruk. PAD belum mengambil peran yang besar dalam APBD dan daerah belum punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap APBD rendah dan pertumbuhan PAD rendah.



Gambar 2: Peta Kemampuan Keuangan Berdasarkan Kuadran

3.5. Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKK)

Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) digunakan untuk mengevaluasi status kemampuan keuangan yang diukur dengan menggunakan indeks *growth*, *share*, dan elastisitas. Dengan metode IKK akan diketahui status kemampuan keuangan dari masing-masing kabupaten/kota dan dapat melihat mana saja peringkat indeks kemampuan keuangan Kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2015 hingga 2019. Dalam IKK akan membagi kabupaten/kota menjadi tiga status kemampuan keuangan yaitu Tinggi, Sedang dan Rendah.

Tabel 6: Status IKK Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

Kabupaten Kota	IKK	Status
Kota Sungai Penuh	0,564	Tinggi
Tanjab Barat	0,560	
Merangin	0,508	
Tebo	0,505	
Bungo	0,484	
Sarolangun	0,469	
Muaro Jambi	0,465	
Kerinci	0,422	Sedang
Batanghari	0,414	
Tanjab Timur	0,389	
Kota Jambi	0,386	

Sumber: Data sekunder yang diproses, 2020

Dapat diketahui bahwa Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) tinggi yaitu Kota Sungai Penuh sebesar 0,564, diikuti oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 0,560, Kabupaten Merangin sebesar 0,508, Kabupaten Tebo sebesar 0,505, Kabupaten Bungo sebesar 0,484, Kabupaten Sarolangun sebesar 0,469, Kabupaten Muaro Jambi sebesar 0,465, Kabupaten Kerinci sebesar 0,422, Kabupaten Batanghari sebesar 0,414, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 0,389) dan Kota Jambi sebesar (0,386).

3.6. Tingkat Kemandirian Daerah

Tingkat Kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Hasil analisis tingkat kemandirian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2015-2019, dapat dilihat seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 7: Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata	Pola Hubungan
1	Kerinci	6,91%	6,09%	6,91%	7,42%	8,57%	7,18%	Instruktif
2	Bungo	10,75%	9,85%	11,96%	12,42%	12,33%	11,46%	Instruktif
3	Tebo	6,05%	6,38%	7,93%	7,55%	7,03%	6,99%	Instruktif
4	Merangin	6,64%	6,51%	7,11%	6,85%	6,14%	6,65%	Instruktif
5	Sarolangun	5,04%	6,22%	6,94%	9,30%	10,25%	7,55%	Instruktif
6	Batanghari	7,59%	7,63%	8,45%	9,87%	11,37%	8,98%	Instruktif
7	Muaro Jambi	5,98%	5,06%	5,23%	6,59%	6,14%	5,80%	Instruktif
8	Tanjab Timur	3,13%	3,63%	4,56%	7,23%	4,26%	4,56%	Instruktif
9	Tanjab Barat	5,98%	8,04%	8,31%	7,41%	6,94%	7,33%	Instruktif
10	Kota Sungai Penuh	5,36%	5,58%	6,54%	6,35%	6,02%	5,97%	Instruktif
11	Kota Jambi	27,59%	24,70%	28,16%	25,32%	28,10%	26,77%	Konsultatif
	Rata-Rata	8,28%	8,15%	9,28%	9,66%	9,74%	9,02%	Instruktif

Sumber: Data sekunder yang diproses, 2020

Berdasarkan pada tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2015-2019 semuanya sangat rendah dengan pola hubungannya adalah instruktif karena berada dibawah 25%, dan hanya terdapat satu daerah yang berada di kriteria rendah yaitu Kota Jambi yaitu berada diatas 26%. Hal ini berarti bahwa kemampuan PAD untuk menopang pendanaan pembangunan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi relatif belum mampu untuk berotonomi. Jika diurutkan Kota Jambi memiliki tingkat rata-rata kemandirian keuangan yang paling tinggi yaitu sebesar 26,77% kemudian diikuti oleh Kabupaten Bungo 11,46%, Kabupaten Batanghari 8,98%, Kabupaten Sarolangun 7,55%, Kabupaten Tanjab Barat 7,33%, Kabupaten Kerinci 7,18%, Kabupaten Tebo 6,99%, Kabupaten Merangin 6,65%, Kota Sungai Penuh 5,97%, Kabupaten Muaro Jambi 5,80% sedangkan untuk daerah Kabupaten/Kota yang memiliki nilai persentase terendah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebesar 4,56%.

3.7. Tingkat Ketergantungan Daerah

Tingkat saling ketergantungan daerah menjelaskan tingkat ketergantungan suatu daerah pada bantuan eksternal atau transfer dari pemerintah pusat dalam mendanai kegiatan pemerintahan dengan membandingkan rasio pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah. Hasil analisis tingkat ketergantungan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2015-2019, dapat dilihat seperti pada tabel di bawah ini:

Table 8: Tingkat Ketergantungan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

No	Kabupaten/Kota	2015	2015	2015	2015	2015	Rata-Rata
1	Kerinci	93,54%	94,26%	93,53%	93,09%	92,11%	93,31%
2	Bungo	90,29%	91,03%	89,32%	88,96%	89,03%	89,72%
3	Tebo	94,30%	94,01%	92,65%	92,98%	93,43%	93,47%
4	Merangin	93,77%	93,89%	93,36%	93,59%	94,21%	93,77%
5	Sarolangun	95,20%	94,15%	93,51%	91,49%	90,70%	93,01%
6	Batanghari	92,95%	92,91%	92,21%	91,01%	89,79%	91,78%
7	Muaro Jambi	94,35%	95,18%	95,03%	93,81%	94,21%	94,52%
8	Tanjab Timur	96,97%	96,50%	95,64%	93,26%	95,92%	95,65%
9	Tanjab Barat	94,36%	92,56%	92,33%	93,10%	93,51%	93,17%
10	Kota Sungai Penuh	94,91%	94,71%	93,86%	94,03%	94,32%	94,37%
11	Kota Jambi	78,37%	80,19%	78,03%	79,80%	78,06%	78,89%
Rata-Rata		92,64%	92,67%	91,77%	91,37%	91,39%	91,97%

Sumber: Data sekunder yang diproses, 2020

Berdasarkan pada tabel 8 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat ketergantungan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi adalah sebesar 91,97%. Tingkat ketergantungan daerah di kabupaten/kota Provinsi Jambi tahun 2015-2019 adalah sangat tinggi. Kabupaten/Kota dengan rata-rata tingkat ketergantungan daerah paling tinggi adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebesar 95,65% yang diikuti oleh Kabupaten Muaro Jambi sebesar 94,52%, Kota Sungai Penuh sebesar 94,37%, Kabupaten Merangin sebesar 93,77%, Kabupaten Tebo sebesar 93,47%, Kabupaten Kerinci sebesar 93,31%, Kabupaten Tanjab Barat sebesar 93,17%, Kabupaten Sarolangun sebesar 93,01%, Kabupaten Batanghari sebesar 91,78%, Kabupaten Bungo sebesar 89,72% dan yang paling terendah adalah Kota Jambi dengan tingkat ketergantungannya sebesar 78,89%.

3.8. Peta Kemampuan Keuangan Daerah

Pemetaan kemampuan keuangan daerah adalah metode untuk menentukan posisi kemampuan keuangan daerah disetiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama rentang waktu 5 tahun yakni dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Peta kemampuan keuangan daerah diukur berdasarkan tingkat kemandirian keuangan daerahnya dan tingkat ketergantungan daerah. Hasil dari pemetaan kemampuan keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode tahun 2015-2019, dapat dilihat seperti pada tabel di bawah ini:

Table 9: Pemetaan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2015-2019

Uraian	TKtD i > TKtD	TKtD i < TKtD
TKDi > \bar{x}TKD		Kabupaten Bungo Kota Jambi
TKDi < \bar{x}TKD	Kabupaten Kerinci Kabupaten Tebo Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjab Timur Kabupaten Tanjab Barat Kota Sungai Penuh	Kabupaten Batanghari

Sumber: Data sekunder yang diproses, 2020

Pada tabel 9 menunjukkan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa daerah yang dikategorikan baik adalah daerah dengan tingkat kemandirian daerah yang tinggi dan tingkat ketergantungan daerah yang rendah. Daerah yang sudah termasuk kedalam kategori ini adalah Kabupaten Bungo dan Kota Jambi. Sementara kabupaten/kota yang memiliki tingkat kemandirian daerah lebih rendah dan tingkat ketergantungan daerah lebih rendah adalah Kabupaten Batanghari. Sedangkan untuk kabupaten/kota dengan kemandirian daerah lebih rendah dan memiliki tingkat ketergantungan daerah yang tinggi adalah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Musro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kota Sungai Penuh.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan; 1) Hasil pemetaan kinerja PAD menunjukkan bahwa Kabupaten Bungo dan Kabupaten Batanghari berada di kuadran I dengan memiliki nilai *growth* dan *share* yang tinggi; 2) Kabupaten/kota yang memiliki indeks kemampuan keuangan (IKK) tinggi yaitu Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi; 3) Tingkat kemandirian di rata-rata Provinsi Jambi termasuk dalam kriteria sangat rendah sebesar 9,02%. Daerah Kota Jambi masuk kriteria kemandirian yang rendah dan lainnya sangat rendah: Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjab Barat, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; 4) Tingkat ketergantungan daerah di Provinsi Jambi sangat tinggi dengan rata-rata sebesar 91,97. Seluruh kabupaten/Kota di Provinsi Jambi memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dan menunjukkan tingkat ketergantungan pembiayaan dalam melakukan pembangunan daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi; dan 5) Pemetaan kemampuan keuangan dengan tingkat kemandirian daerah tinggi dan tingkat ketergantungan daerah rendah adalah Kabupaten Bungo dan Kota Jambi. Kabupaten Batanghari termasuk memiliki tingkat kemandirian daerah rendah dengan tingkat Ketergantungan daerah yang rendah. Wilayah yang tingkat kemandirian daerah rendah dan tingkat ketergantungan daerah tinggi adalah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjab Timur, Kabupaten Tanjab Barat dan Kota Sungai Penuh

Sarandari kesimpulan penelitian, yakni rekomendasi dapat diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi sehubungan dengan daerah di Kuadran II dan III, di mana mereka membutuhkan dorongan untuk meningkatkan pertumbuhan PAD mereka, sementara daerah di Kuadran IV membutuhkan beberapa upaya khusus seperti upaya pajak yang lebih besar. Daerah dengan IKK sedang direkomendasikan untuk mempertimbangkan antara rencana pertumbuhan PAD dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan dalam hal kemandirian daerah membutuhkan komitmen untuk mensinergikan

peningkatan sumber pendapatan yang tersedia dengan mencari potensi lokal di setiap wilayah. Ruang fiskal yang lebih besar dari pengeluaran rutin dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, dan meningkatkan minat investor untuk melakukan lebih banyak investasi di wilayah tersebut untuk mengurangi tingkat ketergantungan fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, dkk. (2013) *Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 1 No. 2. Oktober 2013. ISSN: 2338- 4603
- Dethan, S.H. (2015) *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009-2013*. Jurnal.
- Halim, A. (2002) *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2007) *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hidayat, M., dkk. (2016) *Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat di Era Otonomi Daerah*. Jurnal.
- Kuncoro, M, (2004) *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2012) *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE.
- Mardiasmo. (2002) *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Marina, F. P, dkk. (2018) *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2011-2016*. Jurnal. Universitas Sam Ratulangi.
- Purba dan Mimba. (2019) *Analysis on the Regional Financial Performance of Regencies/Cities in Bali Province*. Journal Of Humanities And Social Science, Volume 24, January 2019. e-ISSN: 2279-0837. Udayana University
- Rahmayati A. (2016) *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013*. Jurnal EKA CIDA Vol. 1 No. 1 Maret 2016. ISSN: 2503-3565. IAIN Surakarta.
- Ropa, M., O. (2016) *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal EMBA 738, Vol.4 No. 2 Juni 2016, Hal. 738-747. ISSN 2303-1174. Universitas Sam Ratulangi.
- Sukrisno, A. (2008) *Auditing Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Public*. Universits Indonesia.
- Sularmi, dan Suwarno, A., E. (2006) *Analisis Kinerja Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah ditinjau dari Aspek Keuangan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan.
- Syamsi, I. (1986) *Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional*. CV Rajawali.
- Widodo, J. (2001) *Tata Kelola yang Baik: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cendekian.